



Bisa Jadi yang Diperiksa Rekan Sendiri

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR). Tim ini tugasnya antara lain menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta Inspektorat perihal indikasi terjadinya kerugian negara atau pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Tim ini juga bertugas memberikan pendapat kepada walikota terkait tindak lanjut temuan itu. "MPTPTGR juga bertugas mengawasi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota. Bisa jadi yang akan diperiksa rekan-rekannya sendiri," kata Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sulistyio, saat melantik tim itu, Senin (27/2), di Balai kota Yogyakarta.

Mereka yang tergabung dalam tim tersebut adalah Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastri selaku Ketua Majelis, Kepala Inspektorat Wahyu Hidayat selaku Sekretaris Majelis. Sedangkan anggota terdiri dari Kepala Bagian Hukum Basuki Hari Saksono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kadri Renggono serta Kepala Badan Kepega-

waan Daerah dan Pelatihan, Maryoto.

Menurut Sulistyio, tim harus bekerja secara profesional mengingat tugasnya sangat berat. Artinya sangat terbuka kemungkinan terjadinya potensi konflik kepentingan.

"Maka hilangkan hal-hal yang menghambat kinerja," ujarnya.

Kasus yang akan ditangani tim tersebut akan melibatkan bendahara atau instansi yang tidak mencatatkan penyetoran penerimaan uang dan barang.

Bentuk kasus lain yang tidak melibatkan bendahara misalnya, meninggalkan tugas belajar sebelum selesai. "Kasus lain misalnya melibatkan pihak ketiga, seperti tidak menepati janji kontrak dan penipuan yang menimbulkan kerugian Negara," ujarnya mencontohkan.

Dia mengatakan, kerugian negara bisa disebabkan oleh tiga pelaku. Pertama, bendahara atau kuasa pengguna anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pendapatandan pengeluaran dengan baik.

Kedua, PNS yang bukan bendahara, yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, menghilangkan barang inventaris, menipudai korupsi.

Ketiga, pihak ketiga yang tidak memenuhi janji dan melakukan penipuan.

Sulistyio percaya MPTPTGR mampu menjalankan tugasnya secara proporsional. Itu sebabnya fungsi majelis ini perlu segera disosialisasikan ke masyarakat supaya ikut mengawasi, sekaligus sebagai bagian dari kontrol sosial.

Di luar jalur hukum
Sekretaris MPTPTGR, Wahyu Hidayat, mengatakan

wilayah kerja tim berada di luar jalur hukum. Itu pun setelah ada rekomendasi BPK dan BPKP.

Dia mencontohkan, apabila ada kerugian dalam bentuk uang, pelaku harus mengembalikan uang. Ini dilakukan untuk menekan kerugian negara. Jika terjadi kerugian dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dikembalikan.

"Pengembalian bisa dengan cara dicicil. Jika tidak

sanggup mencicil statusnya bisa berubah menjadi perkara pidana," tandasnya.

Wahyu berkomitmen akan bekerja profesional dan konsensus menangani kerugian negara yang sudah direkomendasikan oleh BPK dan BPKP. "Jika terjadi kerugian negara Rp 200 juta, saya akan memeriksa terlebih dahulu PNS yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian tersebut," kata dia. (*)



MELANTIK TIM MPTPTGR - Pj Walikota Yogyakarta, Sulistyono, melantik Tim MPTPTGR, Senin (27/2), di Balaikota Yogyakarta. Tim ini bekerja di luar jalur hukum dan bisa jadi akan memeriksa rekan-rekannya sendiri.

ISTIMEWIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005